

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Besok, Dua Cawagub DKI Paparkan Visi-Misi secara Daring

JAKARTA – Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta akan digelar pada Senin 6 April 2020 melalui rapat paripurna DPRD. Sebelum pemilihan digelar, dua calon wakil gubernur (wagub) diberikesempatan memaparkan visi-misinya. Pemaparan visi-misi akan digelar Jumat (3/4) pukul 14.00 WIB melalui telekonferensi atau percakapan jarak jauh. Penggunaan media daring ini dilakukan karena mengikuti anjuran pemerintah terkait *physical distancing* atau menjaga jarak aman. Dari pemaparan secara daring tersebut, anggota DPRD dan masyarakat berkesempatan menilai sosok yang dinilai paling tepat menggantikan posisi Sandiaga Uno.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan, kegiatan telekonferensi akan dihadiri sembilan fraksi, dua calon wagub yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis, dan anggota panlih. Panlih sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta untuk membahas rencana penyiaran kegiatan tersebut secara daring. "Nanti disiarkan menggunakan aplikasi teknologi, mungkin kita akan pakai (Zoom). Jadi bisa disiarkan dan ditonton langsung oleh masyarakat," kata

Farazandi kemarin.

Rencana menggelar pemilihan di tengah situasi Jakarta yang darurat akibat penyebaran virus korona (Covid-19) mendapat kritikan dari berbagai pihak. DPRD dinilai tidak mencontohkan perilaku menjaga jarak aman kepada rakyat. Namun, DPRD berdalih bahwa pemilihan wagub harus segera dilakukan karena faktor kebutuhan yang mendesak. Di tengah penyebaran virus korona, Gubernur Anies Baswedan membutuhkan figur wagub untuk membantunya bekerja dan melayani masyarakat Ibu Kota.

Pemilihan wagub DKI sudah sekian kali tertunda. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 yakni Gerindra dan PKS, mengusulkan dua nama calon wagub kepada DPRD DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. Dua sosok ini menggantikan dua nama cawagub sebelumnya, yakni kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikh. Gerindra dan PKS mengganti nama cawagub karena nama Agung dan Syaikh tidak kunjung diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, dua nama itu sudah diserahkan ke DPRD pada Maret 2019.

Sementara itu, anggota Pan-



Nanti disiarkan menggunakan aplikasi teknologi, mungkin kita akan pakai (Zoom). Jadi bisa disiarkan dan ditonton langsung oleh masyarakat.

FARAZANDI FIDINANSYAH

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta

lih Wagub DKI Jakarta Sandiuka mengatakan mekanisme pemilihan saat rapat paripurna sudah dibicarakan melalui rapat panlih yang dihadiri pimpinan DPRD DKI kemarin. Rapat tersebut mendapatkan dua kesepakatan. *Pertama*, paripurna pemilihan tetap mengacu pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang memutuskan pemilihan wagub DKI dilakukan pada Senin (6/4). Artinya, meski status tanggap darurat di Jakarta diperpanjang hingga 19 April 2020, paripurna pemilihan tetap akan digelar dengan berpe-

ganggan pada hasil rapat Bamus.

Kedua, prosedur yang diperkenankan akan dipenuhi, tahapan-tahapannya, termasuk juga surat pemberitahuan secara vertikal pada instansi terkait. "Jadi, kita tetap berpegangan pada hasil Bamus. Protokoler pelaksanaan harus sesuai apa yang disarankan Dinas Kesehatan khususnya soal *physical distancing*," ujar Andyka di DPRD DKI Jakarta kemarin.

Dalam *physical distancing* itu, nantinya undangan pemilihan hanya sekitar 150 orang dari satu meja yang biasanya dua orang hanya diisi satu orang. Termasuk persyaratan yang diperkenankan dan teknis lainnya akan diatur sedemikian rupa. Menurut politikus Partai Gerindra itu, diselenggarakannya pemilihan wagub DKI mengadopsi kerja politik di DPR beberapa hari lalu dan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait tugas partai politik.

"Inilah yang jadi acuan. Tapi tentu kita tidak mengadopsi seluruhnya, karena ada perbedaan-perbedaan pemilihan wagub ini kan harus ada kehadiran secara fisik. Kita coba mengatur seperti apa protokoler yang memang standar sesuai yang disampaikan Dinas Kesehatan," ungkapnya.

bimasetyadi/sindonews